

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setelah terjadinya perang dunia ke-II, Uni Eropa telah berdiri sebagai persatuan dalam bidang politik dan ekonomi diantara 28 negara di kawasan Eropa. Aturan hukum didirikan oleh Uni Eropa berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara anggota secara sukarela dan demokratis. Tujuan mendasar dari pembentukan Uni Eropa, yaitu berfungsi sebagai lembaga yang dapat diatur secara terbuka dan demokratis serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam rangka mendorong pembangunan penduduk Eropa yang sejahtera, damai, dan stabil. Dapat dilakukan dengan upaya penetapan kebijakan dari berbagai bidang, antara lain hubungan luar negeri, keamanan, migrasi, politik, ekonomi, dan, lingkungan iklim.

Uni Eropa sebagai organisasi yang diatur secara terbuka dan demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, kepada Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Prancis, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani membentuk keanggotaan Uni Eropa saat ini, yang terdiri dari 27 negara.

Organisasi taraf internasional dijalankan melalui gabungan sistem supranasional dan antar pemerintahan. Lembaga utama dalam Uni Eropa mencakup Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Komisi Eropa, Pengadilan Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Ada juga Parlemen Eropa, yang anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggota.<sup>1</sup>



Perang Dunia 1 adalah awal dari negara-negara Uni Eropa yang memisahkan diri. Aljazair secara hukum bukan koloni Perancis, melainkan cabang dari kementerian luar negeri Perancis, oleh karena itu Aljazair memutuskan untuk bergabung ke dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) sebagai anggota Perancis. Setelah berakhirnya Perang Aljazair pada tahun 1962, kemerdekaan diproklamasikan. Negosiasi perdamaian dimulai pada Maret 1961, dan Aljazair memisahkan diri dari Prancis dan Uni Eropa untuk menjadi negara merdeka pada tahun 1962. Aljazair sendiri merupakan negara di Afrika.

Negara kedua yaitu, Greenland, bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada tahun 1973 dan merupakan salah satu wilayah luar negeri Denmark. Greenland akhirnya bergabung karena Denmark saat itu memilih bergabung. Apa yang disebut Referendum Komunitas Ekonomi Eropa Greenland diadakan di Greenland pada tahun 1982, dan mayoritas pemilih memutuskan bahwa Greenland harus keluar dari Komunitas Eropa. Syarat untuk mengundurkan diri Greenland dari

---

<sup>1</sup> "Uni Eropa", diakses pada <https://kemlu.go.id/brussels/id/read/uni-eropa/1669/etc-menu>

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) ini dinegosiasikan pada tanggal 1 Februari 1958 dan pada saat itu juga Greenland mengundurkan diri secara resmi.

Pulau Saint Barthelemy di wilayah Prancis berusaha untuk membangun pusat ekonomi dan mendapatkan perlakuan khusus dari UE dengan menunjukkan bahwa pulau itu memiliki kedudukan hukum domestik. Dan pada tanggal 22 Februari 2007, hasil status baru mulai berlaku. Pulau Saint Barthelemy mengajukan permohonan untuk menjadi negara berdaulat kepada Dewan Uni Eropa. Pulau Saint Barthelemy tidak akan lagi menjadi wilayah Uni Eropa yang paling terisolasi mulai 1 Januari 2010, melainkan akan memperoleh status negara atau wilayah seberang laut berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Uni Eropa. Mulai 1 Januari 2012, Saint Barthelemy secara resmi menjadi Negara berdaulat.

Pada Juni 2016, British Exit yang biasa disebut dengan Brexit, atau keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa, menjadi perbincangan hangat. Pemungutan suara berlangsung pada 23 Juni 2016, Kamis. Warga negara Inggris yang berusia 18 tahun ke atas memiliki kesempatan untuk memilih "Inggris keluar dari Uni Eropa" atau "Inggris tetap di Uni Eropa" dalam pemilihan ini. Dan hasil membuktikan bahwa sebesar 52% warga negara Inggris memilih untuk mengakhiri keanggotaan mereka di Uni Eropa. Sementara sisanya yaitu sebesar 48% memilih untuk tetap berada di zona Euro. Perdana Menteri Inggris David Cameron berjanji untuk mempertahankan pemungutan suara Brexit jika dia terpilih kembali pada

tahun 2015, dan partainya, Partai Konservatif, membenarkannya. Mereka juga berkampanye untuk hak kepemilikan dan kontrol perbatasan untuk Inggris dalam kampanye mereka. Kemudian, Boris Johnson dan lima anggota pemerintah bergabung dengan hampir separuh anggota parlemen Partai Konservatif yang mendukung Brexit. Gisela Stuart dan Kate Hoey, di antara anggota parlemen lainnya, telah menerima mayoritas suara Partai Buruh yang mendukung mereka. Sementara itu, mayoritas partai Buruh justru berkampanye untuk tetap berada di UE.

Pada awal tahun 2010 hingga 2016, tugas pimpinan Negara akan diselesaikan oleh David Cameron dari Partai Konservatif. Mengingat dia terpilih sebagai presiden Inggris dan bahwa Inggris akan segera berusaha untuk meninggalkan Uni Eropa, David Cameron telah berjanji untuk melaksanakan mandat tersebut. David Cameron, bagaimanapun, memiliki sejumlah kondisi untuk mereformasi Uni Eropa. Persyaratan ini meliputi: Pertama, memberikan banyak tekanan pada Brussel untuk mengakui secara bebas kepada Inggris di bawah cita-cita Uni Eropa tentang "persatuan yang erat". Kedua, mata uang resmi Eropa bukanlah Euro.<sup>2</sup> Sudah menjadi tanggung jawab David Cameron untuk menjaga pound otentik sebagai uang Inggris nyata. Keadaan ini disediakan untuk memperoleh kekuasaan melalui parlemen publik Inggris yang kedepannya dapat dimaafkan mandat dari Uni Eropa yang dinilai tidak pantas dan parlemen nanti dapat menggulingkan aturan Uni Eropa yang berlaku.

---

<sup>2</sup> European Council (Art 50). Guidelines for Brexit Negotiations. Council of The European Union 29 April 2017

Hukum dan ketertiban Diantaranya terkait dengan regulasi imigran yang diterapkan oleh Uni Eropa yang Inggris berpikir tentang kerugiannya.<sup>3</sup>

Pada 29 Maret 2017 merupakan awal proses Inggris untuk keluar secara resmi dari keanggotaan Uni Eropa. Saat berjalannya proses untuk meresmikan keluarnya dari Uni Eropa, Theresa May memulai proses Brexit dengan menerapkan Pasal 50 Uni Eropa atau dapat disebut *Article 50 Europe Union* dari perjanjian Lisbon. Dan proses Brexit ini akan memakan waktu sekitar dua tahun untuk memutuskan peresmian referendum tersebut. Alasan ini diperuntukan melakukan peraturan penarikan negara-negara anggota Uni Eropa dari kontrol proses dalam Perjanjian Lisbon. Sebuah negara anggota harus memberi tahu Dewan Uni Eropa dalam jangka waktu tersebut jika memutuskan untuk pergi, menurut Pasal 50 Perjanjian Lisbon. Dia memiliki waktu dua tahun untuk merundingkan secara spesifik pengunduran dirinya dengan dewan. Batas waktu resmi proses Brexit telah diperpanjang oleh Uni Eropa dua kali—dari 29 Maret 2019 hingga 31 Oktober 2019 dan yang terbaru, hingga 31 Januari 2020.

Sebelum Referendum, Inggris terbelah menjadi dua kubu masyarakat yaitu, kubu deal Brexit dan no Deal Brexit. Kubu Deal Brexit ingin Inggris mengundurkan diri dari Uni Eropa dan sedangkan Kubu No Deal Brexit tetap berharap bahwa Inggris akan melanjutkan

---

<sup>3</sup> *ibid*

keanggotaannya di Uni Eropa.<sup>4</sup> Pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa tidak akan sama, menurut kubu Deal Brexit dengan apa yang ditafsirkan sebagai Inggris meninggalkan Eropa lalu mandiri. Meninggalkan Uni Eropa berarti memilih mengundurkan diri dari organisasi yang mereka anggap tidak demokratis dan menyita untuk mengembalikan kedaulatan negara yang selama ini dilanggar oleh Uni Eropa. Oleh karena itu warisan peninggalan keanggotaan Uni Eropa menunjukkan Inggris dapat mengelola operasinya sendiri Politik nasional tentang imigrasi, ekonomi, Politik dan industri negerinya sendiri.

Keinginan Inggris untuk pengunduran diri dari Uni Eropa didorong oleh kebijakan imigrasi Uni Eropa yang sangat liberal. Hal ini juga terlihat pada individu yang menunjukkan intoleransi yang kuat terhadap orang luar, terutama mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda dalam hal agama, budaya, ekonomi, dan tingkat pendidikan. Inggris saat ini merupakan penerima imigran terbesar kedua di belakang Jerman, yang memiliki 7,5 juta imigran, atau 9,3% dari total populasi. Dengan 5,4 juta imigran, Inggris memiliki sekitar 8,4% dari total populasinya.

Selain itu, permasalahan selanjutnya perihal bergabungnya Inggris ke Uni Eropa tentang kebijakan pertanian. Tidak seperti Perancis dan Jerman, Inggris bukan negara yang mengutamakan pertanian. Inggris mengimpor hasil pertanian dari negara-negara persemakmuran. Melihat

---

<sup>4</sup> Mashita Dewi Tidore, 2017, *Dinamika Referendum Inggris Di Uni Eropa Studi Kasus: Referendum Brexit*, Skripsi, Makassar, Universitas Hassanudin, Hal. 9-12.

kebijakan tersebut, Inggris merasa kurang relevan dengan negaranya. Walaupun memiliki posisi yang penting, masalah pertanian ini masih sulit diatasi. Terlihat bahwa Masyarakat Ekonomi Eropa masih belum berhasil menentukan Common Farm Price (CFP). Secara umum, Masyarakat Ekonomi Eropa berharap pendapatan sektor pertanian akan sama dengan pendapatan sektor ekonomi lainnya.

Dalam empat puluh tiga tahun sejak bergabung pada tahun 1973, hubungan antara Inggris dan Uni Eropa mencapai pada batasnya di tahun 2016 tersebut. Dinamika di antara mereka membuat keinginan Inggris untuk mengundurkan diri dari Uni Eropa sudah tidak mengejutkan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pasang surut Inggris dan Uni Eropa yang sudah dekat, seharusnya tidak mengejutkan jika mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Sehingga penulis ingin mengajukan topik skripsi dengan judul **“PENGARUH KEBIJAKAN BREXIT TERHADAP PEREKONOMIAN INGGRIS DI KAWASAN UNI EROPA 2019-2021”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Prancis dan Jerman memiliki peran utama dalam perkembangan Uni Eropa, yang didirikan pada tahun 1952 dan sejak itu berkembang menjadi struktur yang menggunakan metode Supranasional dan antar pemerintah. Ke-28 anggota Uni Eropa memperdebatkan beberapa keputusan di berbagai bidang; sebaliknya, Inggris bergabung dengan Uni

Eropa pada 1 Januari 1973. Setelah Perang Dunia II, Inggris mengalami kemunduran ekonomi dan politik sebelum bergabung dengan Uni Eropa, atau yang kemudian dikenal dengan European Economic Community (EEC). Sejak 1939–1945, Kerajaan Inggris dan kekuatannya telah kehilangan dukungan dari seluruh dunia. Inggris mengerti bahwa mereka harus mengatasi masalah di wilayahnya sejak itu.

Karena penerapan organisasi bebas pajak antar negara anggota yang semakin maju, yang membuat Inggris merasa seolah-olah tidak akan mampu bersaing tanpa bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa, Inggris memutuskan untuk bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (nama yang digunakan sebelumnya Uni Eropa) (MEE). Sebagai Perdana Menteri dan Pemimpin Pemerintah Partai Konservatif, Harold Macmillan menyadari situasi ini dan pada tahun 1961 mengajukan permintaan kepada Inggris untuk bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Namun, proses pengajuan Inggris untuk bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) tidak sederhana.

Perdebatan tentang integrasi Inggris ke dalam Uni Eropa, terutama di bawah kepemimpinan M. Thatcher dan John Major, perjanjian bab sosial yang saling bertentangan tentang European Monetary Union (EMU), Bank Sentral Eropa, mata uang tunggal dan Perjanjian Maastricht menjadikan Inggris terisolasi dalam Uni Eropa. Buruh dan Konservatif memiliki sikap yang sangat berbeda, tetapi masih melayani kepentingan bersama, yaitu Inggris. Melihat lemahnya pengaruh Inggris di Uni Eropa,

Pemerintah Buruh Inggris di bawah kepemimpinan Tony Blair yang menjadi Perdana Menteri (1997–2007) tertarik untuk dapat berpartisipasi pada integritas Eropa. Jika dengan terus berpartisipasi pada integrasi Eropa dapat meningkatkan pengaruh Inggris di Uni Eropa, maka upaya-upaya yang dicanangkan oleh Blair akan kembali pada Pragmatisme Inggris yang bukan hanya dalam bidang ekonomi tetapi dalam bidang politik juga. Setelah 43 tahun menjadi anggota Uni Eropa, dari pendiriannya pada tahun 1973 hingga puncaknya, Inggris mengadakan referendum pada 23 Juni 2016, dengan 52% memilih untuk pergi dan 48% memilih untuk tetap tinggal. Namun, butuh waktu lama—paling tidak dua tahun—untuk menyelesaikan seluruh proses Inggris keluar dari UE.

Di masa Inggris transisi untuk keluar dari Uni Eropa, Uni Eropa masih belum menentukan apakah Inggris dapat keluar dari keanggotaan mereka. Hal ini tentunya sangat merugikan Inggris jika adanya no deal Brexit disebabkan jika Inggris mengalami no deal Brexit, maka Inggris harus membayar administrasi sebesar 9,2 miliar dollar AS setiap tahunnya. Dinilai hutang akan meningkat mencapai 90% dari keseluruhan pengeluaran perekonomian, pemerintahan Inggris mengusulkan untuk menaikkan jumlah hutang untuk mendorong belanja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sangat disayangkan hal itu belum dapat terealisasikan karena sejak tahun 2020, Inggris justru mengalami krisis yang belum pernah dialami sebelumnya. Suplai makanan tersendat,

banyak industri kehilangan pekerjaanya karena sebagian besar tenaga kerjanya adalah warga asing.

Selain itu, beberapa negara juga mengalami kerugian Proporsional yang cukup besar. Tidak hanya berdampak pada negara anggota Uni Eropa, kebijakan Brexit juga berdampak pada negara berkembang. Oleh karena itu, Banyak hal yang harus dirundingkan antara Inggris dan Uni Eropa walaupun Inggris sudah resmi tidak bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa sejak 31 Januari 2020, kendala terbesar yang dihadapi merupakan perihal standar ekspor-impor, hak penangkapan ikan, dan penyelesaian masalah yang mungkin terjadi di masa depan.

Rumusan masalah yang dikemukakan penulis berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya adalah

### **1.2.1. Masalah Pokok (Research Question)**

Apa langkah yang dapat dilakukan Inggris untuk menstabilkan ekonomi negaranya pasca Brexit?

### **1.2.2. Pertanyaan Operasional**

- Apa saja faktor yang mempengaruhi Inggris untuk melakukan Referendum?
- Dampak ekonomi apa yang terjadi pasca kebijakan Brexit terhadap keanggotaan negara Uni Eropa?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan penelitian dalam pengkajian ini, berkenaan dengan tujuan serta kegunaan penelitian dari Karya Tulis ini. Diharapkan tujuan dan kegunaan akan penelitian ini dapat menyajikan pandangan serta pengetahuan mengenai target dan kegunaan mengenai penelitian ini. Tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini akan dijelaskan menjadi dua yakni, sebagai berikut:

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang didasarkan dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan. Maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak yang terjadi pada ekonomi yang berada di Kawasan Uni Eropa terhadap kebijakan Brexit. Selain itu, penelitian ini akan melihat bagaimana hubungan ekonomi internasional antara Inggris dengan negara-negara anggota Uni Eropa setelah Brexit.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini untuk memberi pemahaman tentang penyebab “Brexit” dan dampak ekonomi internasional yang terjadi diantara negara-negara anggota Uni Eropa setelah “Brexit”. Penulis ingin penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan penyebab “Brexit”, dampak ekonomi internasional yang terjadi diantara negara-negara

anggota Uni Eropa setelah “Brexit”. Penulis juga berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang hendak meneliti permasalahan sejenis.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan berisi penjelasan yang terkandung di dalam masing-masing BAB secara singkat dari keseluruhan penelitian ini, seluruh penulisan disusun secara sistematis.

BAB I adalah Pendahuluan. Pada BAB ini menggambarkan dasar masalah, perincian masalah dan sistematika penulisan yang jelas. Pada bagian awal akan menjelaskan tentang bagaimana Inggris bergabung dan memisahkan diri dalam Uni Eropa serta gambaran luas ekonomi Inggris setelah Brexit.

BAB II adalah Kajian Pustaka. Bagian ini menggambarkan kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diarahkan oleh penulis. Selain itu, juga akan mengkaji terkait dengan kerangka konsep atau kerangka teori yang digunakan sebagai alat dalam menangani masalah penelitian. Sistem hipotesis dan ide yang digunakan adalah Teori pertumbuhan ekonomi dan kepentingan nasional

BAB III adalah Metodologi Penelitian. Bagian ini membahas tentang metode yang dilakukan penulis pada penelitian, penentuan informan, Teknik pengumpulan data, analisis data dan pengolahan data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk dianalisis secara deskriptif.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang analisis penyebab Inggris melakukan Brexit, dampak ekonomi yang dihasilkan oleh Inggris pasca Brexit, serta ekonomi Negara anggota Uni Eropa pasca Brexit.

BAB V adalah Kesimpulan. Pada bab ini penulis menyimpulkan dari bagaimana Inggris melakukan Brexit hingga efeknya terhadap ekonomi Uni Eropa pasca Brexit.

